

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- APHTN-HAN, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2025.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ault, Hugh. J. and Brian J. Arnold. *Comparative Income Taxation: A Structural Analysis*. 3rd ed. The Netherlands: Kluwer Law International BV, 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Badan Kebijakan Fiskal. *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, 2025.
- Badan Kebijakan Fiskal. *Perjalanan Transformasi Kebijakan Fiskal: Cipta, Cita, dan Asa*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, 2023.
- Baker, Phillip. *Double Taxation Conventions*. London: Sweet & Maxwell, 2012.
- Budiarso, Adi. *Kerja Sama Multilateral Indonesia di Sektor Keuangan*. Bogor: Penerbit IPB Press, 2019.
- Crivelli, Ernesto, Ruud De Mooij, dan Michael Keen. *IMF Working Paper: Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries*. Washington DC: International Monetary Fund, 2015.
- Darussalam dan Danny Septriadi. *Membatasi Kekuasaan Untuk Mengenakan Pajak*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Darussalam dan Danny Septriadi. *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center Publisher, 2017.
- Darussalam, Danny Septriadi, dan Atika Ritmelina Marhani. *Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center Publisher, 2024.
- Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji. *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2013.
- Darussalam, Danny Septriadi, dan Riyhan Juli Asyir. *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi*. Edisi Kedua. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center Publisher, 2023.
- Darussalam, et.al. *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*. Edisi Kedua, Volume II. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center Publisher, 2023.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Reformasi adalah Keniscayaan, Perubahan adalah Kebutuhan: Cerita di Balik Reformasi Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI, 2021.

- Direktorat Jenderal Pajak. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI, 2024.
- Direktorat Perpajakan Internasional. *Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Perpajakan Internasional*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2024.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fhad Syahril, Muh. Akbar, Riza Amalia Rifani, dan Khaerul. *Pengantar Hukum Pajak*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Fuest, Clemens *et.al.* *Working Paper: Profit Shifting and “Aggressive” Tax Planning by Multinational Firms: Issues and Options for Reform*. Mannheim: ZEW - Leibniz Centre for European Economic Research, 2013.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis Fungsi, dan Materi Muatan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- INFID, *et.al.* *Bunga Rampai: Mengkaji Akses Indonesia Menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Perspektif Masyarakat Sipil*. Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development, 2024.
- InsideTax. *Aksi BEPS: Menangkal Penggerusan Basis Pajak*. 38th ed. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2016.
- InsideTax. *Di Balik Suap Pajak*. 15th ed. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2013.
- InsideTax. *Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban*. 20th ed. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2014.
- Kadir, Abdul. *Kapita Selekta Perpajakan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2016.
- Khalimi dan Moch. Iqbal. *Hukum Pajak Teori dan Praktik*. Bandar Lampung: Aura Publisher, 2020.
- Lim, Setiadi Alim, Budi Setiorahardjo, dan Hari Hananto. *Hukum Pajak Menggunakan PTKP 2015*. Surabaya: Universitas Surabaya, 2015.
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Mulkan, Hasanah, dan Serlika Aprita. *Hukum Pajak*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2023.
- Nataherwin, Syanti Dewi, dan Widyasari. *Pajak Internasional*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- OECD. *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar Two Blueprint*. Paris: OECD Publishing, 2020.
- Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Prabowo, Hari, *et.al.* *Implementasi Komitmen Indonesia pada Forum G20 Tahun 2021*. Jakarta: Prakerti Kolektif Intelegensia, 2022.
- PwC. *Indonesian Pocket Tax Book 2024*. Jakarta: PT Prima Wahana Caraka, 2024.

- Ranadireksa, Hendarmin. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung: Fokusmedia, 2016.
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- S, M. Farouq. *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sakti, Nufransa Wira. *Panduan Praktis Mengurus Pajak secara Online: Daftar, Bayar, Lapor*. Jakarta: Visimedia, 2015.
- Sharon Byrd, B. & Joachim Hruschka. *Kant's Doctrine of Right: A Commentary*. 1st ed. United Kingdom: Cambridge University Press, 2010.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan H. Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Stefaner, Markus dan Mario Züger. *Tax Treaty Policy and Development*. Vienna: Linde, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Taufik, Mohammad. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2018.
- Warta Fiskal. *Tax Holiday Untuk Mendorong Investasi*. ed. IV. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, 2018.
- Zakaria, Jaja. *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Peraturan Perundangan-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* (Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Untuk Eliminasi Pajak Berganda Sehubungan dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan dan Pencegahan Pengelakan dan Penghindaran Pajak (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore for The*

Elimination of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and The Prevention of Tax Evasion and Avoidance).

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion And Profit Shifting* (Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba).

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion And Profit Shifting* (Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba).

Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Tax Examination Abroad* dalam Rangka Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional.

Tugas Akhir

Ali Fikri, Muhammad Basith. “Analisis Ketentuan *Anti Treaty Shopping* di Indonesia.” Tesis Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2024.

Andika, Dimas. “Analisis Pemenuhan Kewajiban Administrasi Perpajakan Atas Penghasilan Musisi Internasional Sebagai Wajib Pajak Luar Negeri.” Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 2008.

- Audriana, Riza. "Dampak Asimilasi Pasal *Independent Personal Services* dalam Pasal *Permanent Establishment* (Suatu Wacana terhadap Perubahan Kebijakan P3B Indonesia)." Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 2008.
- Ginting, Res Hanifah. "Analisis Formulasi Kebijakan Pilar 2 OECD di Indonesia." Tesis Magister Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok, 2024.
- Harir Sihab, Muhammad Mufti. "Implikasi Penerapan Pilar 2 OECD di Indonesia." Karya Tulis Tugas Akhir Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, 2022.
- Hariyono, Nurul Putri. "Tinjauan Pemenuhan Prinsip Keadilan Pajak Dalam Perubahan Sistem Pemajakan WNA Dengan Keahlian Tertentu." Karya Tulis Tugas Akhir Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, 2022.
- Manar, Hafssa. "Pillar Two and Developing Countries: What to Expect?" Master's Thesis in Tax Law Faculty of Law, Uppsala Universitet, Uppsala, 2023.
- Mangoting, Benny. "Penentuan Status *Beneficial Owner* Untuk Mencegah Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda." Tesis Magister Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Martatilova, Luh Putu Adinda. "Kajian Normatif Yuridis Mengenai Peraturan Anti Penghindaran Pajak (*Anti Avoidance Rule*) Menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Di Indonesia." Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Purba, Arnaldo. "*Base Erosion and Profit Shifting in Indonesia*." Dissertation Doctor of Philosophy of The Australian National University, Canberra, 2018.
- Puspitasari, Meita. "Analisis Penerapan Kerangka Inklusif *Base Erosion And Profit Shifting* (BEPS) Pada Peraturan Perpajakan Indonesia." Tesis Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2022.
- Tampubolon, Yohana. "Analisis Dampak Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Migas (*Masterlist*) terhadap Target Penerimaan Negara." Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2021.
- Thorne, Danielle. "The Double Irish and Dutch Sandwich tax strategies: Could a general anti-avoidance rule counteract the problem caused by the utilisation of these structures?" Master's Thesis in Tax Law Faculty of Law, University of Wellington, New Zealand, 2013.
- Triastika, Winda. "Prospek Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Indonesia-Singapura Terhadap Peningkatan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kedua Negara." Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

Artikel Ilmiah

- Agustin, Anggun Khairunnisa, *et.al.* (2024). "Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25," *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 596-606. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1810>.
- Aulia, Sandra. (2024). "Comparative Studies of Tax Administration on Transfer Pricing," *Journal of Governance and Administrative Reform (JGAR)*, (1), 39-51, <https://doi.org/10.20473/jgar.v5i1.57398>.
- Avi Yonah, Reuven S. (2021). "The New International Tax Regime," *University of Michigan Law and Economics Research Paper*, 21(031), 1-9. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3939442>.
- Belianto, Daniel dan Ning Rahayu. (2024). "Tinjauan Kebijakan Global Minimum Tax dan Implikasinya bagi Indonesia," *Syntax Literate: Indonesia Scientific Journal*, 9(10), 5174-5185. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i8.17075>.
- Brothers, Joseph B. (2014). "From the Double Irish to the Bermuda Triangle," *Tax Analysts*, 7(3), 687-695. <https://www.sven-giegold.de/wp-content/uploads/2015/03/From-Double-Irish-to-Bermuda-Triangle-2014.pdf>.
- Burrus, Heydon Wardell. (2023). "Pillar Two and Developing Countries: The STTR and GloBE Implementation," *Intertax*, 51(2), 118-113. <https://doi.org/10.54648/taxi2023009>.
- Charles, James, dan Pablo Dwipa Ananta Siregar. (2024). "Optimalisasi Penerimaan Negara: Penyesuaian Insentif Pajak atas Investasi di IKN terhadap BEPS Pilar 2," *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(12), 1732-1743. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i12.6581>.
- Chrysilla, Jessica dan Amelia Sandra. (2023). "Determinan Indikasi *Tax Avoidance* Perusahaan Multinasional," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(2), 625-641. <https://doi.org/10.47233/jebd.v25i2.440>.
- Dariati, Sebma Nidia. (2016). "Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional Era Orde Baru Tahun 1983-1988," *Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(2), 388-402. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/14705>.
- Darmayasa, I Nyoman, Yuyung Rizka Aneswari, dan Elana Era Yusdita. (2016). "Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Melalui *Withholding Tax System*," *Jurnal InFestasi*, 12(2), 203-216. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i2.2769>.
- den Berg, Tjeerd van, Marcel Kriek, and Ying Than. (2022). "Tax Challenges Arising from the Digitalization of the Economy: The Calculation of the Effective Tax Rate – Pillar Two versus Financial Accounting," *IBFD Journal Articles: International Transfer Pricing Journal 2022*, 29(7), 2-19. <https://doi.org/10.59403/2xxwtr6>.
- Faisal, Abdul Halim, dan Dewi Wulansari. (2018). "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Direktorat Jenderal Pajak Belum Menerapkan Bantuan Penagihan Pajak Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak

- Berganda (P3B),” *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(4), 1-20. <https://doi.org/10.22146/abis.v6i4.58800>.
- Furqon, Rahmat Heryan, Azhar Affandi, dan Dadang Suwanda. (2022). “Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Aksi Korporasi yang Berpotensi Menurunkan Penerimaan Pajak Negara,” *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 757-765. <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.689>.
- Gunarto, Natania Aurielle dan Priyo Hari Adi. (2023). “Why Avoids More? A Cross-country Evidence of Economic Policy Uncertainty and Tax Avoidance,” *International Journal of Social Science and Business*, 7(3), 669-679. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i3.54746>.
- Hany, Sharah Puan, *et.al.* (2023). “Pengaruh Keringan Sanksi Administrasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnalku*, 3(2), 174-186. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i2.453>.
- Hapsari, Nidya. (2024). “The Talented Mr. Golden Visas: Indonesia Temporary Tax Resident,” *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 12(1), 27-34. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v12i1.3769>.
- Harnaeni, Nani. (2022). “Analisis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Sebagai Alat Pemerintah Untuk Menunjang Program Pemulihan Ekonomi Nasional,” *Jurnal Parameter*, 7(1), 251-267. <http://dx.doi.org/10.37751/parameter.v7i1.227>.
- Hidayat Asri S, Ichbal Rahmat dan Theresia Woro Damayanti. (2021). “Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak: *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi,” *Jurnal Proaksi*, 8(2), 329-343. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.1873>.
- Indawati, Yana, Teddy Prima Anggriawan, dan Pusaka Bintang Sakti. (2024). “Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia,” *Unes Law Review*, 6(4), 9796-9802. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Ismah, Nurul dan Agustin Setya Ningrum. (2020). “Tinjauan Komprehensif atas Peraturan Pembatasan Interest Deductions and Other Financial Payments di Indonesia,” *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 70-84. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1443>.
- Kurniawan, Agung dan Ning Rahayu. (2022) “Tantangan Pengaturan Anti-treaty Shopping di Indonesia Setelah Berlakunya Multilateral Instrument,” *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3792-3803. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1095>.
- Lastanti, Hexana Sri. (2012). “Asimilasi Pasal 14 Tentang *Independent Personal Services* ke Dalam Pasal 7 Tentang *Business Profit* Dalam OECD Model,” *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*, 7(2), 77-92. <https://doi.org/10.25105/jipak.v7i2.4501>.
- Lazuardi, Yanuar dan Aris Nur Rakhmayani. (2018). “Implementasi *Tax Planning* Melalui Pemanfaatan *Grey Area* Perpajakan Untuk

- Penghematan PPh Terutang,” *Jurnal Ekbis: Analisis Prediksi, dan Informasi*, 19(2), 1157-1171. <https://doi.org/10.30736/ekbis.v19i2.175>.
- Liana, Siska, Carolyn Lukita, dan Nurul Amalia Ramdan. (2025). “Tinjauan OECD *Inclusive Framework* dalam Meminimalisir *Base Erosion Profit Shifting* dan Implikasinya terhadap Indonesia,” *Jambura Accounting Review*, 6(1), 12-21. <https://doi.org/10.37905/jar.v6i1.145>.
- Lima Carvalho, Lucas de. (2024). “The Belated Pillar 2 Subject-to-Tax Rule, Part 1,” *Tax Notes International*, 111(13), 1715-1724. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5003414>.
- Loomis, Stephen C. (2012). “The Double Irish Sandwich: Reforming Overseas Tax Havens,” *St. Mary’s Law Journal*, 43(4), 825-853. <https://commons.stmarytx.edu/thestmaryslawjournal/vol43/iss4/3>.
- Mursyid, Fariz Paradipta. (2018). “Analisis Komparasi Kebijakan India dan Indonesia dalam Penanganan Google Tax,” *Journal of International Relations*, 4(3), 349-359. <https://doi.org/10.14710/jirud.v4i3.21043>.
- Najicha, Fatma Ulfatun. (2022). “Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat,” *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(1), 169-181. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4568>.
- Nalik, Remigius Jon, Suyanto, dan Andri Wakista Aji. (2021). “Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan,” *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 335-356. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6331>.
- Noor Fatikhah, R. Dewi, Arik Prasetya, dan Aji Firmansyah Widya. (2024). “Initiating National and International Tax Policy Innovation in G20 Presidency Tax Issues,” *Proceedings of the 2023 Brawijaya International Conference (BIC 2023): Advances in Economics, Business and Management Research*, 102-112. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-525-6_12.
- Nugroho, Adrianto Dwi. (2009). “Anti-Avoidance Rules Di Indonesia Pasca Amandemen UU Pajak Penghasilan,” *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(1), 109-126. <https://doi.org/10.22146/jmh.16249>.
- Pangesti Mulyono, Resha Dwi Ayu. (2018) “Melawan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) Demi Menyelamatkan Penerimaan Negara Indonesia,” *Media Mahardhika*, 17(1), 131-141. <https://doi.org/10.29062/mahardika.v17i1.65>.
- Picciotto, Sol, Jeffery M. Kadet, dan Bob Michel. (2024). “A Tale of Two Subject-to-Tax Rules,” *Tax Notes International*, 113(10), 1236-1245. <https://digitalcommons.law.uw.edu/faculty-articles/1066>.
- Pratama, Faqih Aji dan Ferry Irawan. (2021) “Studi Komparatif Aplikasi Tax Treaty Indonesia-Tiongkok dan Indonesia-Singapura,” *Educoretax*, 1(3), 174-187. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.26>.
- Pratama, Juwita Putri, Lita Tyesta ALW, dan Sekar Anggun Gading Pinilih. (2022). “Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan

- Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 865-885. <https://doi.org/10.31078/jk1946>.
- Puspita, Deanna dan Meiriska Febrianti. (2018). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1), 38-46. <https://dx.doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>.
- Puspitasari, Meita dan Danny Septriadi. (2023). “Analysis of The Implementation of Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Inclusive Framework on Indonesian Tax Regulation,” *Contemporary Accounting Case Studies*, 2(2), 364-384. https://feb.ui.ac.id/uploads/2023/09/Meita-Puspitasari_cacs-2.2.pdf.
- Putri, Dewi Anggraeni. (2014). “Aspek Hukum Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Internasional,” *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 87-96.
- Putri, Dhestiani Amara dan Fatma Ulfatun Najicha. (2021). “Reformasi Perpajakan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Positum*, 6(2), 168-178. <https://doi.org/10.35706/positum.v6i2>.
- Putri, Kumalasari Kartika, *et.al.*, (2023). “BEPS Action Plan 13: Definition, Benefit, Challenge, and Change,” *Eurasia: Economics & Business*, 5(71), 9-16. <https://doi.org/10.18551/econeurasia.2023-05>.
- Qikmia, Jazilatul dan Hero Priono. (2021). “Penerapan PPh Pasal 26 Atas Dividen WPLN Pada PT BPD Jatim,” *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper* (SeNAPaN), 1(1), 183-191. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.238>.
- Rafsanjani, Nurkholis dan Benny Gunawan Ardiansyah. (2021). “Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 15 Terhadap Kantor Perwakilan Perusahaan Asing,” *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(1), 37-48. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1215>.
- Ramadani, Putri, Salwa Latipah, dan Dini Vientiny. (2024). “Perhitungan dan Pengenaan PPh Pasal 26: Keterkaitan Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak,” *Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 349-356. <https://qjurnal.my.id/index.php/sur/article/view/846>.
- Salwah, Siti dan Eva Herianti. (2019). “Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 30-36. <https://doi.org/10.35814/jrb.v3i1.978>.
- Samarakoon, Navodhya. (2023). “The Effect of the Closure of the Double Irish Arrangement on the Location of U.S. Multinational Companies’ Profits,” *SSRN*, 1-39. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4285001>.
- Sandell, John. (2012). “*The Double Irish and the Dutch Sandwich*: How Some U.S. Companies Are Flummoxing the Tax Code,” *Tax Notes International*, 67(9), 867-878.
- Saragih, Johaness Glorinus. (2023). “Adapting Indonesia’s Tax Incentive Strategy in The Post Pillar Two Era,” *TAXPEDIA: Journal of Tax Policy, Economic and Accounting*, 1(2), 136-149. <https://doi.org/10.61261/muctj.v1i2.47>.

- Sari, Erma Wulan, Mareta Putri Hapsari, dan Nadiva Arti Salsabila. (2022). "Pengaruh Resesi Ekonomi Global 2023 bagi Perpajakan di Indonesia," *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 1022-1027. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.3145>.
- Satria Darma, I Gusti Bagus, *et.al.* (2024). "Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 43458-43466. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/20749>.
- Schoemaker, Paul J.H. (1995). "Scenario Planning: A Tool for Strategic Thinking," *MIT Sloan Management Review*, 36, 25-40. https://www.researchgate.net/profile/Paul-Schoemaker-2/publication/220042263_Scenario_Planning_A_Tool_for_Strategic_Thinking/links/0deec5325c34174de2000000/Scenario-Planning-A-Tool-for-Strategic-Thinking.pdf.
- Setiabudi, Andang Wirawan, Christianus Yudi Prasetyo, dan Jesslyn Huberta Tanada. (2022). "Konstruksi Model OECD *Base Erosion Profit Shifting Action Plan 12th* Guna Mewujudkan Transparansi Perencanaan Pajak," *Jurnal Akuntansi*, 16(2), 141-156. <https://doi.org/10.25170/jak.v16i2.2875>.
- Sinaga, Niru Anita. (2018). "Reformasi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1), 1-19. <https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.136>.
- Soetoto, Natasha Gita dan Abdul Haris Muhammadi. (2023). "Evaluation of Withholding Income Tax Implementation For Foreign Workers In PT X," *Contemporary Accounting Case Studies*, 2(2), 385-405. https://feb.ui.ac.id/uploads/2023/09/Natasha-Gita-Soetoto_cacs-2.2.pdf.
- Surono dan Vita Apriliasari. (2022). "Pengaruh Pillar 1 OECD (*Unified Approach*) Terhadap Pemajakan Digital di Indonesia," *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2S), 462-471. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1868>.
- Tambunan, Maria R.U.D. (2020). "Adopting BEPS Inclusive Framework in Indonesia: Taxation Issues and Challenges in a Digital Era," *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 25(3), 141-152. [10.20476/jbb.v27i3.11829](https://doi.org/10.20476/jbb.v27i3.11829).
- Umamah, Reza, *et.al.* (2024). "Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia," *Journal of Macroeconomic and Social Development*, 1(4), 1-19. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.365>.
- WN, Santy Fitnawati, Nuraida Fitria, dan Arif Rahman. (2024) "Penghindaran Pajak dan Pencegahannya," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 191-198. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.806>.
- Yorisca, Yenny. (2020). "Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 98-111. <http://dx.doi.org/10.54629/jli.v17i1.507/>.

Zuliah, Azmiati dan Mhd. Asri Pulungan. (2020). "Pelayanan Publik dalam Kajian Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia," *Law Jurnal Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa*, 1(1), 32-42. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.786>.

Artikel

Amila, Nadia. "Dorong Transparansi Perpajakan, Sri Mulyani Tandatangani Multilateral STTR dengan 40 Negara." 20 September 2024. *www.pajak.com*. Tersedia pada <https://www.pajak.com/pajak/dorong-transparansi-perpajakan-sri-mulyani-tandatangani-multilateral-sttr-dengan-40-negara/>. Diakses pada tanggal 14 April 2025.

Amila, Nadia. "Kemenkeu Beberkan Tantangan Perpajakan Internasional." *www.pajak.com*. 25 September 2024. Tersedia pada <https://www.pajak.com/pajak/kemenkeu-beberkan-tantangan-perpajakan-internasional/>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2025.

Astuti, Melani Dewi dan Zainul Arifin. "Indonesia and The Global Tax Agreement." *jakartaglobe.id*. 25 September 2024. Tersedia pada <https://jakartaglobe.id/opinion/indonesia-and-the-global-tax-agreement>. Diakses pada tanggal 9 April 2025.

Asyir, Riyhan Juli. "Rekomendasi Kebijakan untuk Optimalkan Penerapan Pillar 2 di Indonesia." *www.linkedin.com*. 26 Agustus 2024. Tersedia pada <https://www.linkedin.com/pulse/rekomendasi-kebijakan-untuk-optimalkan-penerapan-pilar-2-di-indonesia-exyjc/>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2025.

Ayu Pramesti, Tri Jata. "Status Hukum Ratifikasi." *hukumonline.com*. 15 Mei 2018. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-uu-ratifikasi-lt4c69b1cbd0492/>. Diakses pada tanggal 17 November 2024.

Azzahra, Nabiila. "Sri Mulyani Teken Instrumen Multilateral OECD untuk Hindari Penggerusan Basis Pajak." *www.tempo.co*. 21 September 2024. Tersedia pada <https://www.tempo.co/ekonomi/sri-mulyani-teken-instrumen-multilateral-oecd-untuk-hindari-penggerusan-basis-pajak-7524>. Diakses pada tanggal 4 April 2025.

Azzahra, Qonita. "Sri Mulyani Bongkar Alasan Prabowo Hapus Kebijakan Fiskal." *tirto.id*. 8 November 2024. Tersedia pada https://tirto.id/sri-mulyani-bongkar-alasan-prabowo-hapus-badan-kebijakan-fiskal-g5yD#google_vignette. Diakses pada tanggal 10 Januari 2025.

Badan Kebijakan Fiskal. "Indonesia Perkuat Kerja Sama Pajak Global Melalui Penandatanganan Instrumen Multilateral Subject to Tax Rule (STTR)." *fiskal.kemenkeu.go.id*. 20 September 2024. Tersedia pada <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/586>. Diakses pada 20 November 2024.

Badan Kebijakan Fiskal. "Lawan Upaya Penghindaran Pajak, Indonesia Ratifikasi Multilateral Instrument on Tax Treaty." *fiskal.kemenkeu.go.id*. 22 Januari 2020. Tersedia pada <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2020/01/27/093150844111694->

- lawan-upaya-penghindaran-pajakindonesia-ratifikasi-multilateral-instrument-on-tax-treaty. Diakses pada tanggal 17 November 2024.
- Badan Kebijakan Fiskal. “Manfaat Kesepakatan Sistem Perpajakan Internasional yang Baru Bagi Indonesia.” *fiskal.kemenkeu.go.id*. 15 Juli 2021. Tersedia pada https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/siaran-pers/file/1627990261_Siaran%20Pers%20Manfaat%20Kesepakatan%20BEPS%20untuk%20Perpajakan%20Indonesia.pdf. Diakses pada tanggal 13 November 2024.
- Badan Kebijakan Fiskal. “Sejarah Badan Kebijakan Fiskal.” *fiskal.kemenkeu.go.id*. Tersedia pada <https://fiskal.kemenkeu.go.id/profil>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2025.
- Badan Pusat Statistik. “Berita Resmi Statistik: Ekspor Januari mencapai US\$20,52 miliar, turun 8,34 persen dibanding Desember 2023 dan Impor Januari 2024 senilai US\$18,51 miliar, turun 3,13 persen dibanding Desember 2023.” *www.bps.go.id*. 15 Februari 2024. Tersedia pada <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/15/2335/ekspor-januari-2024-mencapai-us-20-52-miliar--turun-8-34-persen-dibanding-desember-2023-dan-impor-januari-2024-senilai-us-18-51-miliar--turun-3-13-persen-dibanding-desember-2023.html>. Diakses pada tanggal 27 April 2025.
- Bani Putri, Sekar Nasly. “Bentuk Usaha Tetap: Tarif Pajak, Jenis, dan Contohnya.” *artikel.pajakku.com*. 8 September 2023. Tersedia pada <https://artikel.pajakku.com/bentuk-usaha-tetap-tarif-pajak-jenis-dan-contohnya/>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2024.
- Benita Sari, Luh Putu. “DJP Dalam Evaluasi Unit Pelayanan Publik.” *pajak.go.id*. 23 Agustus 2021. Tersedia pada <https://pajak.go.id/id/artikel/djp-dalam-evaluasi-unit-pelayanan-publik>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2024.
- Bergen Quast, Bob Juchter van. “Example of a tax minimization technique, called “double Irish with a Dutch sandwich.” *www.linkedin.com*. 8 Agustus 2017. Tersedia pada <https://www.linkedin.com/pulse/example-double-irish-dutch-sandwich-bob-juchter-van-bergen-quast/>. Diakses pada tanggal 13 November 2024.
- Bloomberg Tax. “OECD Inclusive Framework.” *pro.bloombergtax.com*. Tersedia pada <https://pro.bloombergtax.com/insights/international-tax/beps-the-oecd-taxation-of-the-digital-economy/>. Diakses pada tanggal 14 November 2024.
- Bloomberg Tax. “What is sales tax nexus?” *pro.bloombergtax.com*. 14 Mei 2024. Tersedia pada <https://pro.bloombergtax.com/insights/state-tax/how-to-determine-state-sales-tax-nexus/>. Diakses pada tanggal 25 November 2024.
- Bloomberg Tax. “What Is the OECD Multilateral Instrument?” *pro.bloombergtax.com*. 11 Maret 2024. Tersedia pada <https://pro.bloombergtax.com/insights/international-tax/oecd-beps->

- and-the-multilateral-instrument/. Diakses pada tanggal 17 November 2024.
- Cahyadi, Hepi. “Konsensus Dunia Mengejar Pajak Google.” *pajak.go.id*. 19 Juni 2019. Tersedia pada <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/konsensus-dunia-mengejar-pajak-google>. Diakses pada tanggal 12 November 2024.
- Cahyasari, Windah Ferry. “Empat Belas Juli, Awal Sejarah Reformasi Perpajakan.” *pajak.go.id*. 13 Juli 2018. Tersedia pada <https://www.pajak.go.id/artikel/empat-belas-juli-awal-sejarah-reformasi-perpajakan>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2024.
- Candra Asmarani, Nora Galuh. “Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?” *news.ddtc.co.id*. 3 Agustus 2021. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/31707/apa-itu-pilar-1-dan-pilar-2-proposal-pajak-oecd>, Diakses pada tanggal 14 November 2024.
- Darussalam. “Apa itu BEPS?” *news.ddtc.co.id*. 19 November 2017. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/literasi/kelas-pajak/11361/apa-itu-beps>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2024.
- DDTC News. “Memahami Arti Tax Ratio.” *news.ddtc.co.id*. 20 April 2017. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/9895/memahami-arti-tax-ratio>. Diakses pada tanggal 12 November 2024.
- Deloitte. “New OECD guidance provides needed detail regarding Pillar Two implementation.” *www.taxathand.com*. 21 Juli 2023. Tersedia pada <https://www.taxathand.com/article/32219/OECD/2023/New-OECD-guidance-provides-needed-detail-regarding-Pillar-Two-implementation>. Diakses pada tanggal 28 April 2025.
- Direktorat Jenderal Pajak. “Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan.” *www.pajak.go.id*. Tersedia pada <https://www.pajak.go.id/eoi/eoir>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2025.
- Direktorat Jenderal Pajak. “Selayang Pandang.” *www.pajak.go.id*. Tersedia pada <https://www.pajak.go.id/selayang-pandang>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2025.
- Fitriya. “Subjek to Tax Rule (STTR) dan Pengaruhnya di Indonesia.” *klikpajak.id*. 30 September 2024. Tersedia pada <https://encr.pw/dfUQZ>. Diakses pada tanggal 9 April 2025.
- Hadnum, Lee. “Pillar Two – Identify Constituent and Excluded Entities.” *oecdpillars.com*. tersedia pada <https://oecdpillars.com/pillar-tab/identify-constituent-and-excluded-entities/>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2025.
- Hadnum, Lee. “Pillar Two: Subject-To-Tax Rule (STTR).” *oecdpillars.com*. Tersedia pada <https://oecdpillars.com/pillar-tab/pillar-two-subject-to-tax-rule-sttr/>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2025.
- Hajar, Wienneta Aulia. “BEPS 2.0 dan Aspek Pajak Internasional.” *konsultanpajak-surabaya.com*. 18 Maret 2022. Tersedia pada <https://konsultanpajak-surabaya.com/beps-20-dan-aspek-pajak-internasional-#gsc.tab=0>. Diakses pada tanggal 12 November 2024.

- Hapsari, Annisa Diah. "Pilar II OECD dan Dampaknya bagi Perpajakan Indonesia." *www.pajak.go.id*. 25 April 2024. Tersedia pada <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pilar-ii-oecd-dan-dampaknya-bagi-perpajakan-indonesia>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2025.
- Hariani, Aprilia. "DJP Beberkan Latar Belakang hingga Manfaat MLI STTR." *pajak.com*. 23 September 2024. tersedia pada <https://www.pajak.com/pajak/djp-beberkan-latar-belakang-hingga-manfaat-mli-sttr/>. Diakses pada tanggal 20 November 2024.
- Hariani, Aprilia. "Indonesia Siap Implementasikan Dua Pilar Pajak Global." *www.pajak.com*. 20 Mei 2022. Tersedia pada <https://www.pajak.com/pajak/indonesia-siap-implementasikan-dua-pilar-pajak-global/>. Diakses pada tanggal 18 April 2025.
- Historia. "Jejak Reformasi Pajak." *mediakeuangan.kemenkeu.go.id*. 31 Oktober 2024. Tersedia pada <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/jejak-reformasi-pajak>. Diakses pada tanggal 10 November 2024.
- Hukumonline. "Government to Introduce Framework on Implementation of Multilateral Subject to Tax Rule." *pro.hukumonline.com*. 25 September 2024. Tersedia pada <https://pro.hukumonline.com/a/lt66f37c94eb69f/government-to-introduce-framework-on-implementation-of-multilateral-instruments-subject-to-tax-rule>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2024.
- Hutagaol, John. "Ini Alasan RI Harus Nego Ulang Tax Treaty dengan Singapura." *www.johnhutagaol.com*. 19 Mei 2020. Tersedia pada <https://www.johnhutagaol.com/post/ini-alasan-ri-harus-nego-ulang-tax-treaty-dengan-singapura>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2025.
- IKPI. "Prabowo Targetkan Peningkatan Tax Ratio hingga 15% Persen pada 2029." *ikpi.or.id*. Tersedia pada <https://ikpi.or.id/prabowo-targetkan-peningkatan-tax-ratio-hingga-15-persen-pada-2029/>. Diakses pada tanggal 4 April 2025.
- Ip, Alvin. "A Guide to The Singapore-Indonesia Double Tax Treaty." *aspireapp.com*, 3 Maret 2025. Tersedia pada <https://aspireapp.com/blog/singapore-indonesia-double-tax-treaty>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2025.
- Ishlah Adimad, Muhammad Rakha. "Dua Sisi Withholding Tax System di Indonesia." *pajak.go.id*. 17 November 2020. Tersedia pada <https://www.pajak.go.id/id/artikel/dua-sisi-withholding-tax-system-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2024.
- Jati, Wisamodro. "Penerapan Pilar Dua dan Pengaruhnya pada Kebijakan Insentif Pajak di Indonesia." *ortax.org*. 23 Januari 2024. Tersedia pada <https://ortax.org/penerapan-pilar-dua-dan-pengaruhnya-pada-kebijakan-insentif-pajak-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2025.
- Kagan, Julia. "What is Double Taxation?" *investopedia.com*. 30 Oktober 2024. Tersedia pada

- https://www.investopedia.com/terms/d/double_taxation.asp. Diakses pada tanggal 22 November 2024.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Solusi Dua Pilar Sebagai Upaya Atasi Masalah Perpajakan Internasional.” *kemenkeu.go.id*. 22 Agustus 2022. Tersedia pada <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Solusi-Dua-Pilar-Atasi-Masalah-Pajak-Internasi-%281%29>. Diakses pada tanggal 25 November 2024.
- Khalisha, Rifdah. “LPEM FEB UI, OECD’s Inclusive Framework Pillar Two: Potential Impact to Indonesian Income Tax Policies.” *feb.ui.ac.id*. 23 Februari 2022. Tersedia pada <https://feb.ui.ac.id/2022/02/24/lpem-feb-ui-oecd-inclusive-framework-pillar-two-potential-impact-to-indonesian-income-tax-policies/>. Diakses pada tanggal 29 April 2025.
- Kommer, Sorina van, *et.al*. “Tax incentives in a Pillar 2 environment – the OECD provides guidance.” *www.dlapiper.com*. 9 Oktober 2022. Tersedia pada https://www.dlapiper.com/es-pr/insights/publications/2022/10/oecd-report-on-tax-incentives-in-a-pillar-2-environment?_x_tr_hist=true. Diakses pada tanggal 17 April 2025.
- KPMG. “Pillar Two and tax incentives.” *assets.kpmg.com*. Januari 2025. Tersedia pada <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/xx/pdf/2025/02/pillar-two-and-tax-incentives-jan-2025.pdf>. Diakses pada tanggal 29 April 2025.
- KPMG. “Pillar Two: Subject to Tax Rule.” *kpmg.com*. Juli 2023. Tersedia pada <https://kpmg.com/kpmg-us/content/dam/kpmg/pdf/2023/tnf-pillar-2-sttr-jul25-2023.pdf>. Diakses pada tanggal 15 November 2024.
- Kristianus, Arnoldus. “Indonesia Joins 42 Nations in Global Pact for Fairer Tax Practices.” *jakartaglobe.id*. 20 September 2024. Tersedia pada <https://jakartaglobe.id/business/indonesia-joins-42-nations-in-global-pact-for-fairer-tax-practices>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2025.
- Kurniati, Dian. “Antisipasi 2 Pilar, Pemerintah Bakal Sederhanakan Administrasi Pajak.” *news.ddtc.co.id*. 3 Oktober 2024. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1805950/antisipasi-2-pilar-pemerintah-bakal-sederhanakan-administrasi-pajak>. Diakses pada tanggal 24 April 2025.
- Kurniati, Dian. “Indonesia Tanda Tangan STTR, Begini Keterangan Resmi DJP.” *news.ddtc.co.id*. 21 September 2024. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1805667/indonesia-tanda-tangani-sttr-begini-keterangan-resmi-djp>. Diakses pada tanggal 20 November 2024.
- Loyens & Loeff. “Subject-to-Tax Rule model treaty provision.” *www.loyensloeff.com*. 18 Juli 2023. Tersedia pada <https://www.loyensloeff.com/insights/news--events/news/subject-to-tax-rule-model-treaty-provision/>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2024.

- Luthfia, Allisa. "Tugas Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Pilar Baru Keuangan Negara." *www.antaranews.com*. 21 Januari 2025. Tersedia pada <https://www.antaranews.com/berita/4599234/tugas-ditjen-strategi-ekonomi-dan-fiskal-pilar-baru-keuangan-negara>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2025.
- MUC Consulting. "Tandatangan Multilateral Instrument STTR, 29 Tax Treaty Indonesia Terdampak." *muc.co.id*. 20 September 2024. Tersedia pada <https://muc.co.id/id/article/tandatangan-multilateral-instrument-sttr-29-tax-treaty-indonesia-terdampak>. Diakses pada tanggal 13 April 2025.
- Nasly, Sekar. "Persiapan Regulasi Subject to Tax Rule, Upaya Kemenkeu Dongkrak Penerimaan Pajak." *artikel.pajakku.com*. 24 September 2024. Tersedia pada <https://artikel.pajakku.com/persiapan-regulasi-subject-to-tax-rule-upaya-kemenkeu-dongkrak-penerimaan-pajak/>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2025.
- Ngantung, Yusuf W. "Memahami Struktur Perencanaan Pajak Google." *news.ddtc.co.id*. 20 Oktober 2016. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/review/analisis/8433/memahami-struktur-perencanaan-pajak-google>. Diakses pada tanggal 9 Mei 2025.
- Nurhidayah, Hilda. "Branch Profit Tax: Pengertian, Tarif, dan Perhitungan." *www.pajak.com*. 27 Juni 2023. Tersedia pada <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/branch-profit-tax-pengertian-tarif-dan-perhitungan/>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2024.
- OECD. "New treaty advances Pillar Two global minimum tax Subject to Tax Rule designed to protect tax bases in developing countries." *www.oecd.org*. 19 September 2024. Tersedia pada <https://www.oecd.org/en/about/news/press-releases/2024/09/new-treaty-advances-pillar-two-global-minimum-tax-subject-to-tax-rule-designed-to-protect-tax-bases-in-developing-countries.html>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2025.
- OECD. "Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy." *oecd.org*. 8 Oktober 2021. Tersedia pada <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf>. Diakses pada tanggal 15 November 2024.
- OECD. "The Subject to Tax Rule in a Nutshell." *oecd.org*. Juli 2023. Tersedia pada <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/sttr/pillar-two-subject-to-tax-rule-in-a-nutshell.pdf>. Diakses pada tanggal 15 November 2024.
- Penn Wharton Budget Model. "The End of The Double Irish: Implications for Us Multinationals and Global Tax Competition." *budgetmodel.wharton.upenn.edu*. 14 Oktober 2024. Tersedia pada

- <https://budgetmodel.wharton.upenn.edu/issues/2024/10/14/the-end-of-the-double-irish>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2025.
- Piatetsky, Peter. "How to Use Shell and Shelf Companies to Launder Money." *www.castellum.ai*. 28 Januari 2025. Tersedia pada <https://www.castellum.ai/insights/what-are-shelf-companies-and-compliance-risks>. Diakses pada tanggal 6 Mei 2025.
- Priyono, Eko. "Keadilan dalam Tata Cara Perpajakan Indonesia: Tantangan dan Harapan." *pajak.go.id*. 21 Februari 2024. Tersedia pada <https://pajak.go.id/id/artikel/keadilan-dalam-tata-cara-perpajakan-indonesia-tantangan-dan-harapan>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2025.
- Qibthiyyah, Riatu M., Christine Tjen, dan Syahda Sabrina. "Perpajakan di ASEAN." Seri Analisis Fiskal *Tax Policy Brief* Edisi 6. *terc.lpem.org*. September 2023. Tersedia pada https://terc.lpem.org/wp-content/uploads/2023/09/Perpajakan_di_ASEAN-TERC_Brief_230914_074447.pdf. Diakses pada tanggal 12 November 2024.
- Ramadani Purnama, Azura Yumna. "Ini Alasan Prabowo Hapus Badan Kebijakan Fiskal di Kemenkeu." *www.bloombergtechnoz.com*. 8 November 2024. Tersedia pada <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/54391/ini-alasan-prabowo-hapus-badan-kebijakan-fiskal-di-kemenkeu/2>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2025.
- Ramadani Purnama, Azura Yumna. "Kebijakan Pajak Minimum Global Tambah Penerimaan Negara Rp8,8 T." *www.bloombergtechnoz.com*. 24 September 2024. Tersedia pada <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/49857/kebijakan-pajak-minimum-global-tambah-penerimaan-negara-rp8-8-t>. Diakses pada tanggal 4 April 2025.
- Redaksi DDTCNews. "Catatan bagi Pemerintah untuk Kejar *Tax Ratio* 15 Persen, Apa Saja?" *news.ddtc.co.id*. 12 Juli 2023. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1795655/catatan-bagi-pemerintah-untuk-kejar-tax-ratio-15-persen-apa-saja>. Diakses pada tanggal 12 November 2024.
- Redaksi DDTCNews. "Konsep MAP dan APA dalam Transfer Pricing, Simak Ulasannya di Sini." *news.ddtc.co.id*. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1795734/konsep-map-dan-apa-dalam-transfer-pricing-simak-ulasannya-di-sini>. Diakses pada tanggal 24 April 2025.
- Redaksi DDTCNews. "Lapor SPT Tahunan Masih Bisa Manual ke Kantor Pajak, Ini Syaratnya." *news.ddtc.co.id*. 12 Maret 2024. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1801202/lapor-spt-tahunan-masih-bisa-manual-ke-kantor-pajak-ini-syaratnya>. Diakses pada tanggal 12 November 2024.
- Redaksi DDTCNews. "Pentingnya Peraturan Domestik Memuat Ketentuan Pajak Internasional." *news.ddtc.co.id*. 13 Maret 2023. Tersedia pada

- <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/46377/pentingnya-peraturan-domestik-memuat-ketentuan-pajak-internasional>. Diakses pada tanggal 17 November 2024.
- Redaksi Ortax. “Bagaimana Dampak Pilar 2 Terhadap Insentif Pajak di Indonesia?” *ortax.org*. 31 Oktober 2023. Tersedia pada <https://ortax.org/bagaimana-dampak-pilar-2-terhadap-insentif-pajak-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 24 April 2025.
- Redaktur Haluan. “Prabowo Bongkar Kemenkeu: Badan Kebijakan Fiskal Dihapus!” *haluan.co*. 11 November 2024. Tersedia pada <https://haluan.co/prabowo-bongkar-kemenkeu-badan-kebijakan-fiskal-dihapus/>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2025.
- Rodl & Partner. “Indonesia signs Subject to Tax Rule.” *www.roedl.com*. 2024. Tersedia pada https://www.roedl.com/insights/newsflash-asean/2024_04/indonesia-signs-tax-subject-rule. Diakses pada tanggal 17 April 2025.
- Rozaq, Arif Miftahur dan Johannes Glorinus Saragih. “Menkeu Sri Mulyani Teken Instrumen Multilateral STTR bersama Anggota OECD/G20.” *www.pajak.go.id*. Tersedia pada <https://www.pajak.go.id/id/berita/menkeu-sri-mulyani-teken-instrumen-multilateral-sttr-bersama-anggota-oecdg20>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2025.
- Safarina, Hamida Amri. “Implementasi ‘Two-Pillar Solution’ Kian Dekat, Siapkah Kita?” *news.ddtc.co.id*. 20 Februari 2024. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/review/analisis/1800706/implementasi-two-pillar-solution-kian-dekat-siapkah-kita>. Diakses pada tanggal 25 November 2024.
- Sandra. “Kapan Saat Dimulainya Kewajiban Perpajakan?” *Pajakku.com*. 28 Maret 2023. Tersedia pada <https://shorturl.at/73YIj>. Diakses pada tanggal 12 November 2024.
- Saputra, Wisnu Saka. “Memahami Skema Double Irish Dutch Sandwich dalam Pajak Digital.” *pajak.go.id*. 11 Oktober 2023. Tersedia pada <https://pajak.go.id/id/artikel/memahami-skema-double-irish-dutch-sandwich-dalam-pajak-digital>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2025.
- Sari, Ferikka Lukmana. “Sri Mulyani Beri Waktu Setahun untuk Transisi 2 Ditjen Baru di Kemenkeu.” *katadata.co.id*. 16 Januari 2025. Tersedia pada <https://katadata.co.id/finansial/makro/6788dc034df87/sri-mulyani-beri-waktu-setahun-untuk-transisi-2-ditjen-baru-di-kemenkeu>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2025.
- Setyawan, Herry. “*Inclusive Framework* Pilar Satu dan Pilar Dua #3.” *komwasjak.kemenkeu.go.id*. 11 Maret 2022. Tersedia pada <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/inclusive-framework-pilar-satu-dan-pilar-dua>. Diakses pada tanggal 25 November 2024.
- Silfia, Imamatul. “Prabowo rombak struktur organisasi Kemenkeu.” *www.antaraneews.com*. 7 November 2024. Tersedia pada <https://www.antaraneews.com/berita/4449797/prabowo-rombak->

- struktur-organisasi-kemenkeu#google_vignette. Diakses pada tanggal 10 Januari 2025.
- Simmons & Simmons. “OECD Two Pillar solution: next steps.” *simmons-simmons.com*. 13 Juli 2023. Tersedia pada <https://www.simmons-simmons.com/en/publications/clk1af8kd00vutpz0hjaeb7hw/oecd-two-pillar-solution-next-steps>. Diakses pada tanggal 14 November 2024.
- Sinaga, Suhut Tumpal. “Pillar 2: New Challenges and Opportunities for Indonesian Tax.” *www.kompas.id*. 9 November 2024. Tersedia pada <https://www.kompas.id/baca/english/2024/11/07/en-pilar-2-tantangan-dan-peluang-baru-bagi-pajak-indonesia>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2025.
- Srivastava, Anup, Hussein Warsame, dan Luminita Enache. “Doubling Down on Double Sandwich Tax Schemes.” *cmr.berkeley.edu*. 30 Maret 2020. Tersedia pada <https://cmr.berkeley.edu/2020/03/doubling-down/>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2025.
- Stepat, David. “The Updated Indonesia-Singapore Tax Treaty Enters into Force.” *www.aseanbriefing.com*. Tersedia pada <https://www.aseanbriefing.com/doing-business-guide/singapore/trade-relationships/the-updated-indonesia-singapore-tax-treaty-enters-into-force>. Diakses pada tanggal 9 Maret 2025.
- Suartama, Dewa. “Jenis-Jenis Penghasilan bagi Bentuk Usaha Tetap.” *ortax.org*. 21 Juni 2023. Tersedia pada <https://ortax.org/jenis-jenis-penghasilan-bagi-bentuk-usaha-tetap>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2024.
- Suartama, Dewa. “Mengenal Apa Itu Subject to Tax Rule (STTR).” *ortax.org*. 12 Oktober 2024. Tersedia pada <https://ortax.org/subject-to-tax-rule>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2025.
- Tax Justice Network. “Tax competition and the race to the bottom.” *taxjustice.net*. 14 November 2020. Tersedia pada <https://taxjustice.net/topics/tax-competition-and-the-race-to-the-bottom/>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2025.
- Tax Policy Alert. “OECD releases Pillar Two STTR.” *www.pwc.com*. 19 Juli 2023. Tersedia pada <https://www.pwc.com/gx/en/tax/newsletters/tax-policy-bulletin/assets/pwc-oecd-releases-pillar-two-sttr.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2025.
- TaxFlash. Vol. 2. “Renegotiated Indonesia – Singapore Tax Treaty – all provisions effective from 1 January 2022.” *www.pwc.com*. 2022. Tersedia pada <https://www.pwc.com/id/en/taxflash/assets/english/2022/taxflash-2022-02.pdf>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2025.
- Teapriangga, Archie. “Tahapan Proses Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Antarneegara.” *news.ddtc.co.id*. 10 Februari 2020. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/berita/infografis/18857/tahapan-proses-perjanjian-penghindaran-pajak-berganda-antarneegara>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2025.

- The Tax Policy Briefing Book. "What are the OECD Pillar 1 and Pillar 2 international taxation reforms?" *taxpolicycenter.org*. Januari 2024. Tersedia pada <https://taxpolicycenter.org/briefing-book/what-are-oecd-pillar-1-and-pillar-2-international-taxation-reforms>. Diakses pada tanggal 25 November 2024.
- Thomson Reuters. "Global minimum tax (GMT): An overview." *tax.thomsonreuters.com*. 29 Mei 2024. Tersedia pada <https://tax.thomsonreuters.com/blog/what-is-global-minimum-tax/>. Diakses pada tanggal 15 November 2024.
- Thomson Reuters. "What is BEPS." *tax.thomsonreuters.com*. Tersedia pada <https://tax.thomsonreuters.com/en/beps>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2024.
- Turner, George. "TaxWatch calls on the European Commission to open an investigation into Google's European Tax Avoidance Scheme." *www.taxwatchuk.org*. 26 April 2019. Tersedia pada https://www.taxwatchuk.org/ec_investigate_google/. Diakses pada tanggal 4 Mei 2025.
- Wahyuni, Willa. "Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik." *www.hukumonline.com*. 11 Oktober 2022. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/tahapan-pembuatan-kebijakan-publik-lt63452ddb789b0/?page=all>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2025.
- Waters, Richard. "Google to end use of 'double Irish' as tax loophole set to close." *www.latimes.com*. 1 Januari 2020. Tersedia pada <https://www.latimes.com/business/story/2020-01-01/google-tax-loophole>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2025.
- Wicaksono, Kurniawan Agung. "Penting Diketahui! Ini Tahapan Proses P3B." *news.ddtc.co.id*. 6 Februari 2020. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/literasi/kelas-pajak/18799/penting-diketahui-ini-tahapan-proses-p3b>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2025.
- Wildan, Muhamad. "Negara Inclusive Framework Teken STTR Pekan Ini, Sri Mulyani Hadir." *news.ddtc.co.id*. 17 September 2024. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/1805540/negara-inclusive-framework-teken-sttr-pekan-ini-sri-mulyani-hadir>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2024.
- Wildan, Muhamad. "PMK Baru! Indonesia Resmi Terapkan Pajak Minimum Global Mulai 2025." *news.ddtc.co.id*. 16 Januari 2025. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808289/pmk-baru-indonesia-resmi-terapkan-pajak-minimum-global-mulai-2025>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2024.
- Wildan, Muhamad. "Bakal Terapkan STTR, Kemenkeu Siapkan Perpres dan Aturan Teknisnya." *news.ddtc.co.id*. 23 September 2024. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1805704/bakal-terapkan-sttr-kemenkeu-siapkan-perpres-dan-aturan-teknisnya>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2025.

- Wildan, Muhamad. "IBFD Catat Insentif Pajak Indonesia Tumpang Tindih dan Berbiaya Mahal." *news.ddtc.co.id*. 24 September 2024. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1805735/ibfd-catat-insentif-pajak-indonesia-tumpang-tindih-dan-berbiaya-mahal>. Diakses pada tanggal 28 April 2025.
- Wildan, Muhamad. "Indonesia Tanda Tangani MLI STTR, Ini 29 P3B yang Tercakup." *news.ddtc.co.id*. 20 September 2024. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1805633/indonesia-tanda-tangani-mli-sttr-ini-29-p3b-yang-tercakup>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2025.
- Wildan, Muhamad. "Resmi Diperbarui, Presiden Jokowi Sahkan P3B Indonesia dan Singapura." *news.ddtc.co.id*. 14 Juni 2021. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/30547/resmi-diperbarui-presiden-jokowi-sahkan-p3b-indonesia-dan-singapura>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2024.
- Wildan, Muhamad. "Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman." *news.ddtc.co.id*. 27 Januari 2022. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/36461/terbit-surat-edaran-soal-p3b-kpp-diminta-samakan-pemahaman>. Diakses pada tanggal 9 Maret 2025.
- Zucman, Gabriel. "International Tax Avoidance by Multinational Firms." *nber.org*. 30 Januari 2024. Tersedia pada <https://www.nber.org/reporter/2022number3/international-tax-avoidance-multinational-firms>. Diakses pada tanggal 12 November 2024.

Kuliah

- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). "Regular Tax Discussion Perkembangan Pillar One and Two: Dampak dan Harapannya Bagi Indonesia." Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Dipublikasikan pada tanggal 15 November 2022. Durasi video: 2.28.25. Tersedia pada <https://www.youtube.com/watch?v=6HYKFesRCW8&t=3187s>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2025.
- Sitorus, Fitzgerald Kennedy. "Pada Mulanya Adalah Pajak: Fondasi Etis Rasional Pajak Menurut Immanuel Kant." Dokas Alumni STF Driyarkara: Jangan Lupa Selasa. Dipublikasikan pada tanggal 19 Januari 2021. Durasi video: 55.18. Tersedia pada <https://www.youtube.com/watch?v=JSEyQ7qD1F0&pp=ygUORkIMU0FGQVQgUEFKQUs%3D>. Diakses pada tanggal 22 November 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Penggantian Judul Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suryo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50223
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918202
Laman: www.undip.ac.id Pos-el: info@undip.ac.id

Nomor : Nota Dinas
Lamp. : ---
Hal : Penggantian Judul Tugas Akhir

Yth. Ketua Program Studi Sarjana Hukum
u.b. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Kami sampaikan dengan hormat, setelah melakukan beberapa kali evaluasi serta analisis terhadap penyusunan materi Tugas Akhir mahasiswa tersebut di bawah ini, kami selaku Pembimbing I/Pembimbing II mengajukan permohonan penggantian judul menjadi sebagaimana berikut:

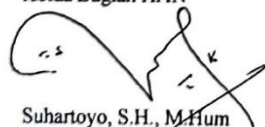
Nama : Hafidz Ilham
NIM : 11000121120156
Nomor HP : 085156662140
Bidang Minat : Hukum Administrasi Negara
Pembimbing I : Dr. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum
Pembimbing II : F.C. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum

Judul Awal : Implementasi Penghindaran Pajak Berganda Dengan Menggunakan *Global Anti-Base Erosion* (GloBE) dalam Sistem Perpajakan di Indonesia
Judul Revisi : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan *Subject to Tax Rule (STTR)* dalam Mencegah *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS)

Kami berharap perubahan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan dilakukan *up-date* data dalam SIAP Fakultas Hukum Undip, dalam rangka tertib administrasi dan menghindari kesalahan di kemudian hari.

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Menyetujui,
Ketua Bagian HAN


Suhartoyo, S.H., M.Hum
196605291998021001

Semarang, 3 Februari 2025
Pembimbing I/Pembimbing II,


Dr. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum
196212081987031001

Lampiran 2 Surat Keterangan Hasil Cek Turnitin



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM**

Jalan dr. Antonius Suroyo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918206
Laman: www.fh.undip.ac.id, Pos-el: [fh\[at\]live.undip.ac.id](mailto:fh[at]live.undip.ac.id)

SURAT KETERANGAN HASIL CEK TURNITIN

Tim Pemeriksa Kemiripan Tulisan Ilmiah telah memeriksa unggahan file atas nama:

Nama : Hafidz Ilham
NIM : 11000121120156
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Tulisan : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Subject to
Tax Rule (STTR) dalam Mencegah Base Erosion and Profit Shifting
(BEPS)
Jenis Dokumen : Skripsi
Tgl Pemeriksaan : 4 Juni 2025

Menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi Turnitin terhadap tulisan ilmiah dengan judul di atas menghasilkan kemiripan/similarity sebesar 5% dengan sumber-sumber online lainnya. Oleh karena itu, tulisan ilmiah tersebut di atas dinyatakan LOLOS cek turnitin.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi

Perpustakaan

Fahimah, S.Sos.

NIP. 197508132001122001